

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

“Teori sinyal dikembangkan pertama kali oleh Spence (1973) untuk menjelaskan perilaku di pasar tenaga kerja (*labour market*). Teori ini menjelaskan perilaku dua pihak ketika mereka mengakses informasi yang berbeda. Teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal (*signaller*) untuk memengaruhi perilaku penerima sinyal” (Ghozali, 2020). “*Signalling theory* (Teori signal) kemudian dikembangkan oleh Ross tahun 1977 yaitu adanya informasi asimetris antara informasi yang berasal dari manajemen (*well-informed*) dan informasi yang berasal dari pemegang saham (*poorly informed*). Pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat” (Purba, 2023).

“Teori sinyal secara luas digunakan dalam studi-studi akuntansi, *auditing*, dan manajemen keuangan yang menjelaskan bahwa manajemen memberikan sinyal tentang perusahaan lewat berbagai aspek pengungkapan informasi keuangan yang dapat dilihat sebagai sinyal oleh investor. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan” (Ghozali, 2020).

“Teori sinyal ialah informasi yang diberikan untuk publikasi sebagai pengumuman yang akan digunakan sebagai sinyal para pemegang saham dalam

mengambil keputusan investasi. Saat informasi dipublikasikan perusahaan dan diterima oleh para pengguna informasi, pengguna informasi melakukan interpretasi dan menganalisis berbagai informasi tersebut sebagai suatu sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*) yang juga sering disebut rumor pasar” (Verta & Rahmi, 2021). Menurut Pangumpia et al. (2021), “*signalling theory* adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga saham di pasar, sehingga akan memberi pengaruh terhadap keputusan investor”. Menurut Said et al. (2025), *PER* yang lebih moderat mengindikasikan valuasi saham yang relatif stabil dan berpotensi mencerminkan kondisi fundamental yang lebih konsisten”. Selain itu, “tren *PER* perusahaan yang cenderung stabil menunjukkan bahwa pertumbuhan laba bersih per saham berjalan seiring dengan kenaikan harga saham perusahaan” (Movizar, 2024). “Kinerja keuangan yang relatif stabil menjadi sinyal positif yang membuat para investor tertarik” (Rissema & Masdjojo, 2024).

2.2 Pasar Modal

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 dijelaskan bahwa, “pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek yang dimaksud adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek”. “Sementara itu efek didefinisikan sebagai surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal” (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Dalam pasar modal, terdapat beberapa jenis efek/instrumen yang diperdagangkan sebagai berikut:

1. “Saham”

“Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas”.
2. “Obligasi”

“Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran”.
3. “Sukuk”

“Sukuk diartikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*) atas aset yang mendasarinya”.
4. “Reksa Dana”

“Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh manajer investasi”.
5. “*Exchange Traded Fund (ETF)*”

“*Exchange traded fund* merupakan reksa dana dimana unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Komposisi portofolio efek yang membentuk reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek harus terdiri dari efek yang likuid”.
6. “Efek Beragun Aset (EBA) Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)”

“EBA merupakan efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif (KIK) EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, sarana peningkatan kredit (*credit enhancement*)/ arus kas (*cash flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut melalui proses sekuritisasi”.

7. “Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA-SP)”

“EBA-SP adalah EBA yang diterbitkan oleh penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP”.

8. “Dana Investasi Real Estat (DIRE)”

“Dana investasi real estat adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas”.

9. “Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA)”

“Dana investasi infrastruktur adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi”.

10. “Dana Investasi Multi Aset (DIMA)”

“Dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang selanjutnya disebut dengan dana investasi multi aset adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal tertentu untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek dan/atau portofolio investasi selain efek”.

11. “KIK Pemupukan Dana Tapera”

“Kontrak investasi kolektif pemupukan dana tapera adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif yang hanya diperuntukan bagi pengelolaan investasi pemupukan dana tapera”.

12. “Instrumen Derivatif”

“Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya (*underlying assets*). Jenis instrumen derivatif antara lain *right*, waran, dan waran terstruktur” (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

“Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian di Indonesia karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, pasar modal dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan” (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Sedangkan menurut Husnan (2005) dalam Hariyanti et al. (2023), “pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu:”

1. “Fungsi Ekonomi”

“Pasar modal sebagai fungsi ekonomi, yaitu menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lenders* (para investor yang menanamkan dananya dalam pasar modal) ke *borrowers* (emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek di pasar modal). *Lenders* mengharapkan akan memperoleh keuntungan imbalan dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan dari sisi *borrowers* tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan”.

2. “Fungsi Keuangan”

“Pasar modal sebagai fungsi keuangan adalah dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para *borrowers*. *Lenders* menyediakan dana tanpa terlibat langsung dalam kepemilikan aset riil yang diperlukan untuk investasi tersebut” (Hariyanti et al., 2023).

“Pasar modal sendiri terdapat beberapa jenis, dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu transaksinya, yaitu:” (Otoritas Jasa Keuangan, 2025)

1. “Pasar Perdana”

“Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor (pemodal) oleh pihak penjamin emisi efek (*underwriter*) melalui perantara pedagang efek (*broker-dealer*) yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*)”.

2. “Pasar Sekunder”

“Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana Efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjual-belikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran umum pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain” (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

2.3 Saham

“Saham (*share*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)” (www.idx.co.id, n.d.). Menurut Weygandt et al. (2022), saham dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. “Share Capital-Ordinary”

“Setelah didirikan, perusahaan dapat mulai menjual hak kepemilikan dalam bentuk saham. Jika suatu perusahaan hanya memiliki satu jenis saham, maka itu disebut *ordinary shares*. Setiap *ordinary shares* memberikan hak kepemilikan kepada pemegang saham sebagai berikut:” (Weygandt et al., 2022)

- a. “Memberikan suara pada pemilihan dewan direksi (*board of directors*) pada rapat tahunan dan pada tindakan perusahaan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham”.
- b. “Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen”.
- c. “Mempertahankan persentase kepemilikan ketika saham baru diterbitkan (*preemptive right*)”.

- d. “Menerima pembagian aset pada saat likuidasi sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Hak ini disebut sebagai *residual claim* karena pemegang saham dibayar dengan aset yang tersisa setelah seluruh klaim lain telah terbayar” (Weygandt et al., 2022).

2. “*Preference Shares*”

“Untuk menarik lebih banyak investor, sebuah perusahaan dapat menerbitkan jenis saham tambahan yang disebut *preference shares*. *Preference shares* memiliki ketentuan kontrak yang memberikan hak istimewa atau prioritas tertentu dibandingkan dengan saham biasa. Umumnya, pemegang saham preferen memiliki prioritas dalam hal (1) pembagian laba (*dividen*) dan (2) pembagian aset jika terjadi likuidasi” (Weygandt et al., 2022). Pemegang saham *preference shares* memiliki hak-hak khusus sebagai berikut:

a. “*Cumulative preference shares*”

“Apabila perusahaan gagal membayar *dividen* pada suatu periode, maka *dividen* tersebut harus dibayarkan pada periode berikutnya sebelum membagikan *dividen* kepada pemegang saham biasa. Setiap *dividen* yang dibagikan pada *cumulative preference shares* adalah *dividend in arrears*”.

b. “*Participating preference shares*”

“Pemegang saham *participating preference* tidak hanya menerima *dividen* dari saham preferen yang telah ditentukan tetapi juga menerima *dividen* dengan jumlah yang sama dengan yang dibagikan kepada pemegang saham biasa”.

c. “*Convertible preference shares*”

“Pemegang saham yang memiliki hak untuk mengonversikan saham preferen menjadi saham biasa sesuai dengan rasio yang telah ditentukan”.

d. “*Callable preference shares*”

“Kondisi yang memperbolehkan perusahaan untuk dapat menarik kembali saham preferen yang beredar pada waktu tertentu dengan harga sesuai kesepakatan”.

e. “*Redeemable preference shares*”

“Saham preferen memiliki periode penebusan wajib yang tidak dapat dikendalikan oleh penerbit” (Kieso et al., 2024).

3. “*Treasury Shares*”

“*Treasury shares* adalah saham milik perusahaan yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali dari pemegang saham, namun belum ditarik dari peredaran. Sebuah perusahaan dapat membeli kembali saham *treasury* karena berbagai alasan:” (Weygandt et al., 2022)

- a. “Untuk menerbitkan kembali saham tersebut kepada pejabat dan karyawan dalam rangka program bonus dan kompensasi saham”.
- b. “Untuk memberi sinyal kepada pasar modal bahwa manajemen meyakini harga saham saat ini terlalu rendah, dengan harapan dapat meningkatkan harga pasarnya”.
- c. “Untuk memiliki saham tambahan yang tersedia guna digunakan dalam akuisisi perusahaan lain”.
- d. “Untuk mengurangi jumlah saham yang beredar dan dengan demikian meningkatkan laba per saham” (Weygandt et al., 2022).

“Untuk mencatat informasi yang diperlukan dalam penerbitan saham dengan nilai nominal, perusahaan menyusun akun untuk setiap kelas saham sebagai berikut.” (Kieso et al., 2024)

1. “*Preference shares* atau *ordinary shares*. Secara keseluruhan, kedua akun saham ini mencerminkan nilai nominal saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan mencatat kredit pada akun-akun ini saat pertama kali menerbitkan saham. Perusahaan tidak membuat pencatatan tambahan pada akun-akun ini kecuali jika menerbitkan saham tambahan atau memanggil kembali saham tersebut”.
2. “*Share premium*. Akun *share premium* menunjukkan kelebihan nilai di atas nilai nominal yang dibayarkan oleh pemegang saham sebagai imbalan atas saham yang diterbitkan kepada mereka. Setelah dibayarkan, kelebihan nilai di atas nilai nominal tersebut menjadi bagian dari *share premium* perusahaan. Pemegang saham individu tidak memiliki hak yang lebih besar atas kelebihan

pembayaran tersebut dibandingkan dengan semua pemegang saham lain dari kelas saham yang sama” (Kieso et al., 2024).

Menurut Kieso et al. (2024), pencatatan yang perlu dilakukan oleh perusahaan saat menerbitkan adalah:

1. “*No-Par Shares*”

“Cash”	“xxx”
“Share Capital-Ordinary/Preference”	“xxx”

2. “*Shares with Par Value or Stated Value*”

“Cash”	“xxx”
“Share Capital-Ordinary/Preference”	“xxx”
“Share Premium-Ordinary/Preference”	“xxx”

“Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu:” (www.idx.co.id, n.d.)

1. “Dividen”

“Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.”

“Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut”.

2. “*Capital Gain*”

“*Capital Gain* merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.

Misalnya investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan *capital gain* sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya” (www.idx.co.id, n.d.).

“Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko, antara lain:” (www.idx.co.id, n.d.)

1. “*Capital Loss*”

“Merupakan kebalikan dari *capital gain*, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di beli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400,- per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 600,- per saham”.

2. “Risiko Likuidasi”

“Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh liabilitas perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.”

“Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh *supply* dan *demand* atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut

(kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya” (www.idx.co.id, n.d.).

“Perusahaan umumnya membeli instrumen investasi berupa surat utang atau saham karena salah satu dari tiga alasan berikut:” (Weygandt et al., 2022)

1. “Sebagai investasi sementara untuk dana kas yang berlebih”

“Sebuah perusahaan mungkin memiliki kelebihan kas yang tidak diperlukan untuk pembelian aset operasional dalam waktu dekat. Misalnya, banyak perusahaan mengalami fluktuasi musiman dalam penjualan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki penjualan yang lebih tinggi pada musim semi dan musim panas dibandingkan pada musim gugur dan musim dingin. Pada akhir siklus operasional, perusahaan mungkin memiliki kas yang sementara tidak terpakai hingga dimulainya siklus operasional berikutnya. Perusahaan dapat menginvestasikan dana berlebih tersebut untuk memperoleh imbal hasil yang lebih besar yaitu bunga dan dividen dibandingkan jika hanya menyimpan dana tersebut di bank”.

2. “Untuk memperoleh pendapatan dari hasil investasi”

“Alasan kedua mengapa beberapa perusahaan melakukan investasi adalah untuk memperoleh pendapatan dari hasil investasi. Misalnya, bank memperoleh sebagian besar pendapatannya dari pemberian pinjaman, tetapi mereka juga memperoleh pendapatan dengan berinvestasi terutama pada surat utang. Sebaliknya, reksa dana saham berinvestasi terutama pada saham untuk memanfaatkan kenaikan harga saham dan pendapatan dividen”.

3. “Karena alasan strategis”

“Perusahaan juga berinvestasi karena alasan strategis. Sebuah perusahaan dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap pelanggan atau pemasok dengan membeli saham mayoritas, namun tidak menguasai, di perusahaan tersebut. Atau, sebuah perusahaan mungkin membeli saham minoritas di perusahaan lain yang bergerak di industri terkait, di mana perusahaan tersebut ingin memperluas

jangkauan bisnisnya. Sebuah perusahaan juga dapat memilih untuk membeli saham mayoritas di perusahaan lain. Misalnya, perusahaan mengakuisisi entitas lain untuk memperluas jangkauan bisnisnya di industri makanan” (Weygandt et al., 2022).

“Terdapat 3 strategi dalam membeli saham yaitu:” (Otoritas Jasa Keuangan, 2025)

1. “*Buy On Weakness* yaitu membeli ketika harga saham sudah turun ke level tertentu yang aman untuk dibeli”.
2. “*Buy If/On Breakout* yaitu membeli ketika harga saham berhasil menembus level tertentu atau naik menembus *resistance* (level tertingginya)”.
3. “*Buy on Retracement* yaitu membeli saham setelah terjadi *breakout* atau harga turun melebihi *support*. Saham yang berhasil *breakout* pada umumnya akan langsung mengalami kenaikan yang kencang” (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

“Kepemilikan investor atas saham biasa entitas yang diinvestasikan dibagi menjadi 3, yaitu:” (Weygandt et al., 2022)

1. “*Holding of Less than 20%*”

“Dalam pencatatan investasi ekuitas dengan porsi kepemilikan kurang dari 20%, perusahaan menggunakan metode nilai wajar (*fair value method*). Pada saat investasi dilakukan, investasi ekuitas dicatat sebesar nilai wajarnya, yang umumnya sama dengan harga perolehan atau harga pembelian awal. Selanjutnya, perusahaan akan mengakui pendapatan ketika menerima dividen tunai dari investasi tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, nilai investasi akan disesuaikan kembali dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai wajar yang terjadi kemudian diakui dan dilaporkan dalam laba bersih perusahaan pada periode berjalan”.

2. “*Holdings Between 20% and 50%*”

“Apabila suatu perusahaan investor hanya memiliki sebagian kecil saham biasa dari perusahaan lain, investor tersebut umumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan yang diinvestasikan. Namun, apabila investor memiliki kepemilikan antara 20% hingga 50% saham biasa suatu perusahaan,

maka investor diasumsikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas keuangan dan operasional perusahaan yang diinvestasikan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan yang diinvestasikan disebut sebagai entitas asosiasi, yaitu entitas yang tidak dikendalikan secara penuh tetapi tetap dapat dipengaruhi oleh investor dalam pengambilan keputusan tertentu. Pengaruh signifikan ini biasanya tercermin melalui keberadaan perwakilan investor dalam dewan direksi entitas asosiasi, sehingga investor dapat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan secara tidak langsung melakukan sebagian kendali terhadap entitas asosiasi tersebut. Dengan demikian, entitas asosiasi dapat dianggap menjadi bagian dari kepentingan strategis perusahaan investor.”

“Berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), investor mencatat bagian laba bersih dari entitas asosiasi pada periode ketika laba tersebut diperoleh. Pada awalnya, investasi dalam saham biasa entitas asosiasi dicatat sebesar nilai perolehannya. Selanjutnya, akun investasi akan disesuaikan setiap tahun untuk mencerminkan bagian ekuitas investor pada entitas asosiasi tersebut. Apabila entitas asosiasi memperoleh laba bersih, perusahaan investor akan menambah (mendebit) akun investasi dan mengakui pendapatan dengan menambah (mengkredit) akun pendapatan sebesar bagian laba yang menjadi hak investor. Sebaliknya, ketika investor menerima dividen dari entitas asosiasi, akun investasi akan dikurangi (dikredit) sebesar jumlah dividen yang diterima karena pembayaran dividen tersebut mengurangi aset bersih entitas asosiasi. Dengan demikian, metode ekuitas mencerminkan perubahan nilai investasi berdasarkan kinerja dan distribusi laba dari entitas asosiasi”.

3. “*Holdings of More than 50%*”

“Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham biasa dari entitas lain disebut sebagai perusahaan induk (*parent company*). Sementara itu, entitas yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut sebagai perusahaan anak atau afiliasi (*subsidiary company*). Dengan kepemilikan saham mayoritas tersebut, perusahaan induk memiliki kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan anak, sehingga perusahaan anak berada

di bawah pengendalian perusahaan induk dalam menjalankan kegiatan usahanya.”

“Ketika suatu perusahaan memiliki lebih dari 50% saham biasa dari perusahaan lain, perusahaan tersebut umumnya menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan yang menggabungkan posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan induk dengan perusahaan anak sebagai satu kesatuan ekonomi. Dalam laporan tersebut disajikan total aset dan liabilitas yang berada di bawah pengendalian perusahaan induk, serta total pendapatan dan beban yang berasal dari perusahaan anak selama periode pelaporan. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi grup perusahaan secara keseluruhan” (Weygandt et al., 2022).

“Dalam berinvestasi saham tentunya investor mengharapkan dapat membeli saham di harga dan waktu yang tepat agar memperoleh keuntungan yang maksimal di kemudian hari. Hal ini tentunya dapat diperoleh dengan adanya metode analisis yang dapat membantu investor tersebut untuk memenuhi harapannya” (Toman et al., 2021). “Penilaian saham merupakan suatu hal penting yang perlu dilakukan bagi investor dalam melakukan kegiatan investasinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan keuntungan yang merupakan syarat dan karakteristik saham *high risk-high return*” (Ganefi et al., 2023). “Ada dua pendekatan analisis yang biasa digunakan oleh investor saham, yakni analisis fundamental dan analisis teknikal” (Firdaus & Kusuma, 2024).

“Analisa teknikal yaitu teknik untuk meramalkan arah perkembangan harga dan petunjuk pertukaran saham lainnya yang bergantung pada data pasar historis yang mempertimbangkan biaya instrumen, volume perdagangan, dan jika mungkin minat atas instrumen” (Toman et al., 2021). Sedangkan, “analisis fundamental adalah salah satu pendekatan untuk penilaian saham dengan memeriksa atau memperhatikan berbagai indikator yang diidentifikasi dengan kondisi makro

ekonomi dan kondisi industri suatu perusahaan hingga berbagai indikator keuangan dan manajemen perusahaan” (Toman et al., 2021).

“Pada prinsipnya analisis fundamental digunakan untuk mengetahui apakah suatu saham *overvalued* (mahal) atau *undervalued* (murah) (Afnan et al., 2021). “Dalam analisis fundamental berasumsi bahwa harga saham yang ada di pasar tidak pernah menunjukkan nilai sebenarnya. Dengan kata lain harga yang di tawarkan di bursa dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya. Oleh karena itu penilaian terhadap nilai wajar saham diperlukan agar pengambilan keputusan investasi dapat dilakukan dengan tepat. Penilaian saham secara fundamental dapat dilakukan dengan berbagai metode yang berlaku untuk mengevaluasi harga kewajarannya” (Ganefi et al., 2023). “Nilai wajar saham atau disebut juga nilai intrinsik saham adalah berapa harga saham tersebut sebenarnya layak dihargai atau suatu jumlah yang mencerminkan nilai saham tersebut sebenarnya” (Toman et al., 2021).

Menurut Christiaan & Abdulkarim (2021), jika harga pasar dari saham sebuah perusahaan lebih rendah dari nilai intrinsiknya maka saham tersebut berada pada posisi *undervalued*, sehingga saham tersebut layak dibeli. Sedangkan jika harga pasar dari saham sebuah perusahaan lebih tinggi dari nilai intrinsiknya maka saham tersebut berada pada posisi *overvalued*, sehingga saham tersebut dinilai menguntungkan untuk dijual. Jika harga pasar dari saham sebuah perusahaan sama dengan nilai intrinsiknya maka saham tersebut berada pada posisi *correctly valued*, sehingga saham tersebut layak ditahan untuk dijual ataupun dibeli. “Pendekatan *price earning ratio* digunakan dalam menilai harga wajar saham karena merupakan metode yang paling sederhana dan mudah” (Haq & Situngkir, 2022).

2.4 Price Earning Ratio (PER)

Price Earning Ratio didefinisikan oleh (Weygandt et al., 2022) sebagai berikut: “the price earning (P-E) ratio is a widely used measure of the ratio of the market price of each ordinary share to the earning per share. The price-earnings (P-E) ratio reflects investors’ assessments of a company’s future earnings”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa “*price earning ratio* adalah ukuran rasio

harga pasar dari setiap saham biasa terhadap laba per saham, dan *price earning ratio* mencerminkan penilaian investor terhadap laba perusahaan di masa yang akan datang”. “*Price Earning Ratio (PER)* berfungsi sebagai indikator finansial yang banyak dimanfaatkan oleh investor untuk mengukur kelayakan dan potensi keuntungan dari suatu investasi saham” (Rachman & Kosadi, 2025).

“*PER* menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba” (Sari et al., 2021). “*Price earning ratio* adalah rasio yang mengukur tentang bagaimana investor menilai prospek pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, dan tercermin pada harga saham yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap rupiah laba yang diperoleh perusahaan. Pendekatan *Price Earning Ratio (PER)* sering digunakan dalam analisis sekuritas untuk menghitung harga saham karena rasio *P/E* secara efektif memberikan perkiraan periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan dana selama periode tertentu ke tingkat harga saham dan keuntungan bisnis” (Ismayana et al., 2021). “*PER* tidak hanya mencerminkan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan laba perusahaan, tetapi juga memperlihatkan tingkat risiko dan prospek masa depan dari perusahaan tersebut” (Marli & Pujiastuti, 2025).

“*PER* mempermudah investor dalam menilai prospek saham kedepannya, *PER* memudahkan investor dalam membandingkan perusahaan-perusahaan di dalam satu industri” (Sari et al., 2021). “Karena dengan menggunakan *PER*, pemodal bisa mengetahui kinerja keuangan perusahaan tersebut baik atau tidak. Penentuan terkait harga saham yang sudah terlalu mahal, normal, ataupun murah bisa dilakukan dengan membandingkan nilai *PER* suatu perusahaan dengan rata-rata *PER* perusahaan lain di industri yang sejenis” (Marwan et al., 2021). “*Price earning ratio* adalah salah satu *tools* indikator yang sangat sederhana, yang digunakan untuk menentukan harga dari suatu saham termasuk ke dalam kategori mahal atau murah” (Natalia, 2021). “Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menilai kewajaran harga saham adalah *Price to Earning Ratio (PER)*” (Marli & Pujiastuti, 2025).

Menurut Natalia (2021), “ada dua macam pembandingan untuk mengetahui posisi *PER* saat ini sudah cukup mengindikasikan harga saham yang mahal atau murah. Pembandingan pertama adalah perusahaan lain (kompetitor) dalam industri yang sama. Analisisnya adalah apabila *PER* lebih rendah daripada rata-rata *PER* industri, maka saham tersebut relatif lebih murah jika dibandingkan dengan saham-saham kompetitornya. Pembandingan kedua adalah rata-rata historis (masa lalu) *PER* saham itu sendiri. Jika *PER* lebih rendah daripada rata-rata *PER* secara historis, maka saham itu relatif lebih murah”.

Menurut Susilawati (2016) dalam Christiaan & Abdulkarim (2021) menyatakan bahwa *price earning ratio* memberikan sinyal kepada investor mengenai hubungan antara harga saham dan kinerja perusahaan. Kenaikan harga saham mencerminkan penilaian positif pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar potensi tingkat pengembalian yang dapat diterima oleh investor. “Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi pada umumnya akan memiliki *price earning ratio* yang relatif tinggi. Nilai *PER* yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pasar bersedia memberikan apresiasi lebih besar terhadap laba perusahaan, karena adanya ekspektasi dan keyakinan investor terhadap prospek dan kinerja perusahaan di masa depan, sehingga saham perusahaan tersebut dihargai pada tingkat yang lebih tinggi” (Wiratno & Yustrianthe, 2022).

“Semakin tinggi rasio *PER*, maka investor memiliki harapan besarnya pengembalian dan perkembangan perusahaan. Hal ini menjadi sinyal positif untuk investor untuk membeli dan mempertahankan saham perusahaan dengan harapan akan memperoleh dividen atau *capital gain*” (Ustman et al., 2021). “Dividen pada prinsipnya adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para investor” (Fiqih & Siswanti, 2021). “Hal ini memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam membuat keuntungan yang tinggi, sehingga akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan” (Reysa et al., 2022).

“Pasar modal mampu mendorong ekspansi perekonomian dari suatu negara dengan menyediakan sumber dana bagi dunia usaha dan memungkinkan investor

untuk memperluas ekspansi perusahaan serta dapat menambah modal perusahaan” (Hutabarat et al., 2024). “Perusahaan seringkali melakukan aksi korporasi untuk mempertahankan eksistensinya. Aksi korporasi adalah salah satu jenis informasi yang tersedia dan berpotensi mendapatkan reaksi yang berbeda dari masing-masing pelaku pasar” (Awabi, 2023). “*Rights issue* merupakan salah satu strategi pendanaan yang umum dilakukan perusahaan terbuka untuk memperoleh tambahan modal melalui penerbitan saham baru yang ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. Tujuan utama dari pelaksanaan *rights issue* tersebut adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan, meningkatkan kapasitas operasional, dan menjamin keberlanjutan aktivitas produksi dan distribusi produk” (Maysi & Edy, 2025).

“*Corporate action* atau tindakan korporasi atau yang juga dikenal dengan nama aksi korporasi merupakan sebuah langkah atau tindakan yang diambil oleh sebuah perusahaan terbuka yang memiliki dampak langsung terhadap kepemilikan saham para investor (pemegang saham)” (Putri et al., 2022). “Perusahaan melakukan aksi korporasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya menyesuaikan kondisi yang terjadi” (Prebawa et al., 2022).

Di sisi lain, “valuasi pasar yang melebihi nilai intrinsiknya mengindikasikan adanya ekspektasi pasar yang terlalu tinggi” (Iswardhani et al., 2025). “Saham dengan *PER* yang terlalu tinggi sebaiknya dihindari karena volatilitasnya juga tinggi dan tentunya sangat berisiko” (snips.stockbit.com, 2022). Wiratno & Yustrianthe (2022) menambahkan, “*price earning ratio* yang terlalu tinggi tidak menarik karena harga saham tidak naik lagi, yang berarti kemungkinan memperoleh *capital gain* akan lebih kecil”. Marwan et al. (2021) menambahkan, “jika *price earning ratio* terlalu tinggi juga dapat mengindikasikan bahwa harga saham yang ditawarkan sudah tinggi atau tidak rasional”. “Tingginya harga saham dapat mengurangi keinginan investor untuk membeli saham tersebut, sehingga harga saham yang tinggi tersebut akan menurun sampai tercipta posisi keseimbangan yang baru. Cara yang dilakukan emiten untuk dapat mempertahankan agar

sahamnya tetap berada dalam rentang perdagangan yang optimal adalah dengan melakukan pemecahan saham (*stock split*). Alasan perusahaan melakukan *stock split* adalah agar terciptanya harga saham yang tidak terlalu tinggi. Dengan harga saham yang tidak terlalu tinggi akan meningkatkan likuiditas perdagangannya” (Setiani & Chinta, 2022).

“Investor akan membeli suatu saham perusahaan dengan *price earning ratio* yang kecil, karena *price earning ratio* yang kecil menggambarkan laba bersih per saham yang cukup tinggi dan harga yang rendah” (Prabandanu, 2022). “*Price earning ratio* yang rendah akan memberikan kontribusi tersendiri bagi investor yaitu investor dapat membeli saham dengan harga murah dan kemungkinan *capital gain* yang diraih semakin besar” (Wiratno & Yustrianthe, 2022). Prabandanu (2022) menambahkan, “semakin rendah *price earning ratio* dari suatu saham menunjukkan harga saham tersebut lebih murah dibandingkan harga saham lain yang sejenis, sehingga pada suatu saat ketika harga saham mulai mengalami koreksi kenaikan (*rebound*), diharapkan investor yang membeli saham dengan *price earning ratio* yang rendah akan mendapatkan keuntungan berupa *capital gain* dari investasi sahamnya. *Price earning ratio* menjadi rendah nilainya bisa karena harga saham cenderung semakin turun atau karena meningkatnya laba bersih perusahaan. Jadi semakin kecil nilai *price earning ratio* maka semakin murah saham tersebut untuk dibeli dan semakin baik pula kinerja per lembar saham dalam menghasilkan laba bagi perusahaan”.

“Saham dengan rasio *PER* yang rendah tidak selalu berarti bahwa saham sedang *undervalued*. Namun, bisa jadi karena perusahaan yang sedang berkinerja buruk” (snips.stockbit.com, 2022). “*Price earning ratio* yang rendah dapat menandakan bahwa perusahaan akan berkinerja buruk di masa depan karena harga sahamnya turun di masa sekarang” (Priharto, n.d.). Anatasia et al. (2024) menambahkan, “*price earning ratio* yang rendah dapat memberikan sinyal negatif bagi investor bahwa saham perusahaan tersebut mungkin sedang diperdagangkan dengan harga yang rendah relatif terhadap pendapatan bersih yang dihasilkan perusahaan”.

Ketika harga saham terlalu rendah, perusahaan dapat melakukan *reverse stock split*. “*Reverse stock split* merupakan penggabungan beberapa saham menjadi satu dengan nominal yang lebih tinggi. Perusahaan yang melakukan *reverse stock split* bertujuan untuk meningkatkan harga saham dengan harapan harga saham kembali pulih dan optimal, sehingga harga saham tidak terlalu rendah. Karena jika harga saham terlalu rendah, maka saham akan dikeluarkan dari bursa atau disebut dengan *delisting*. Namun, di Indonesia sangat jarang perusahaan yang melakukan *reverse stock split* karena akan dianggap kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja dan sulit bertahan lama atau akan mengalami kebangkrutan” (Maiyaliza et al., 2021).

Menurut Said et al. (2025), *PER* yang lebih moderat mengindikasikan valuasi saham yang relatif stabil dan berpotensi mencerminkan kondisi fundamental yang lebih konsisten. “Secara umum, *PER* di bawah 10 dianggap rendah, antara 10 dan 20 dianggap wajar/moderat, dan di atas 20 dianggap mahal” (Graham, 1973). Selain itu, “Nilai *PER* perusahaan berada pada tren yang stabil mencerminkan bahwa peningkatan laba bersih per lembar saham diiringi dengan kenaikan harga saham” (Movizar, 2024). “Kinerja keuangan yang relatif stabil menjadi salah satu alasan para investor tertarik” (Prihatiningsih et al., 2023).

Weygandt et al. (2022) merumuskan cara yang digunakan untuk menghitung *Price Earning Ratio (PER)* sebagai berikut:

$$PER = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Earning per Share}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

PER : *Price earning ratio*
Market Price per Share : Rata-rata *closing price* harian selama satu tahun
Earning per Share : Laba per lembar saham

Menurut Weygandt et al. (2022), “*market price* ditentukan atas transaksi yang terjadi antara pembeli saham dengan penjual. Secara umum, harga yang ditetapkan oleh pasar cenderung mengikuti tren laba dan dividen perusahaan”.

“Harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal” (Jogiyanto, 2018 dalam Sugiartini et al., 2023).

“Di pasar sekunder (bursa) atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Permintaan dan penawaran atas suatu saham dipengaruhi banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik berhubungan dengan saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut berada) maupun faktor yang sifatnya makro atau eksternal, seperti perkembangan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik” (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Menurut Widoatmojo (2005) dalam Widyastuti & Rahayu (2021), terdapat beberapa jenis-jenis harga saham, yaitu:

1. “Harga Nominal”

“Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal”.

2. “Harga Perdana”

“Merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat dibursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (*underwriter*) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana”.

3. “Harga Pasar”

“Merupakan harga jual dari investor yang satu dengan yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat dibursa. Transaksi di sini tidak melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena

transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar”.

4. “Harga pembukaan”

“Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak selalu terjadi”.

5. “Harga Penutupan”

“Adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau ini yang terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut”.

6. “Harga Tertinggi”

“Adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama”.

7. “Harga Terendah”

“Adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertinggi”.

8. “Harga Rata-Rata”

“Harga rata-rata merupakan perataan dari harga tertinggi dan terendah” (Widyastuti & Rahayu, 2021).

Menurut Weygandt et al. (2022), “*earning per share (EPS)* merupakan ukuran laba bersih yang diperoleh dari setiap lembar saham biasa yang beredar.

Nilai *EPS* dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tertentu. Perhitungan laba bersih per saham ini memberikan perspektif yang berguna bagi investor dan pihak terkait dalam menilai tingkat profitabilitas perusahaan, karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk setiap saham yang dimiliki pemegang saham biasa”. “*Earning per share* atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. *Earning per share* merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham” (Chandra, 2021).

“Rasio *EPS* yang rendah menandakan manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham dengan nilai keuntungan yang tinggi. Hal sebaliknya saat rasio *EPS* tinggi, maka perusahaan berhasil mensejahterakan pemegang saham karena nilai keuntungan yang tinggi. Informasi yang terdapat di dalam *EPS* menggambarkan besarnya jumlah laba bersih perusahaan setelah bunga dan pajak yang dibagikan kepada para pemegang saham” (Chandra, 2021).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024), “laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (pembilang) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (penyebut) dalam suatu periode”. “*Earning per share* menunjukkan laba yang diperoleh dari setiap lembar saham biasa. Sehingga perusahaan hanya melaporkan *earning per share* hanya untuk saham biasa” (Kieso et al., 2024).

“Secara umum, *earning per share* dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Terdapat dua jenis *earning per share*, yaitu *basic EPS* atau laba per saham dasar dan *diluted EPS* atau laba per saham dilusian. Perbedaannya yaitu *diluted EPS includes the effect of all potential dilutive ordinary shares that were outstanding during the period* yang berarti laba per saham dilusian mencakup efek dari seluruh instrumen yang berpotensi saham biasa beredar pada periode tertentu” (Kieso et al., 2024). Pada perhitungan *price earning ratio*, jenis *EPS* yang digunakan adalah *basic EPS*.

Weygandt et al. (2022) merumuskan cara yang digunakan untuk menghitung *Earning per share (EPS)* sebagai berikut:

$$EPS = \frac{Net\ Income - Preference\ Dividends}{Weighted\ Average\ Ordinary\ Shares\ Outstanding} \quad (2.2)$$

Keterangan:

<i>EPS</i>	: <i>Earning per share</i>
<i>Net Income</i>	: Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
<i>Preference Dividends</i>	: Dividen saham preferen
<i>Weighted Average Ordinary Shares Outstanding</i>	: Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar

“Penghasilan (*income*) adalah peningkatan aset, atau penurunan liabilitas, yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Beban (*expenses*) adalah penurunan aset, atau peningkatan liabilitas, yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim entitas” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024), “laba bersih (*net income*) dalam laporan laba rugi diperoleh melalui beberapa tahapan perhitungan. Pertama, pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan untuk menghasilkan laba bruto. Selanjutnya, laba bruto disesuaikan dengan menambahkan penghasilan lain serta bagian laba dari entitas asosiasi, kemudian dikurangi biaya distribusi, beban administrasi, beban lainnya, dan biaya pendanaan sehingga menghasilkan laba sebelum pajak. Setelah itu, laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan untuk memperoleh laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Apabila terdapat operasi yang dihentikan, maka kerugian dari operasi tersebut juga dikurangkan sehingga diperoleh laba tahun berjalan atau laba bersih perusahaan”.

“Dalam melaporkan informasi laba per saham, suatu perusahaan harus menghitung laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Untuk melakukannya,

perusahaan mengurangi dividen atas saham preferen dari laba dari operasi yang berlanjut dan laba bersih. Jika suatu perusahaan membagikan dividen atas saham preferen dan terjadi rugi bersih, perusahaan menambahkan dividen preferen tersebut ke dalam rugi (sehingga meningkatkan jumlah rugi) untuk keperluan perhitungan rugi per saham. Dalam semua perhitungan laba per saham, *weighted average ordinary shares outstanding* selama periode tersebut menjadi dasar untuk jumlah per saham yang dilaporkan. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut memengaruhi jumlah saham yang beredar. Perusahaan harus membojotkan saham berdasarkan fraksi periode di mana saham tersebut beredar. Alasan di balik pendekatan ini adalah untuk menemukan jumlah setara saham utuh yang beredar untuk tahun tersebut” (Kieso et al., 2024).

2.5 Current Ratio (CR)

Berdasarkan Weygandt et al. (2022), “*current ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya”. “*Current ratio* merupakan ukuran yang paling umum terhadap kesanggupan perusahaan membayar liabilitas jangka pendeknya atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan” (Abdurrohman et al., 2021).

“Semakin tinggi *CR*, semakin besar aset lancar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek, yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu melunasi utang jangka pendek dengan aset lancar” (Wiliasari & Harjanto, 2022). “*CR* yang baik adalah jika aset lancar perusahaan lebih besar dibandingkan dengan utang lancar perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketercapaian laba” (Putri, 2022). Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan laba yaitu dengan mengelola aset lancar yang dimiliki perusahaan. Sebagai contoh, “pengelolaan persediaan penting karena dapat menentukan keseimbangan investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan. Persediaan yang tinggi memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang mendadak” (Rivaldy et al., 2022). Dengan kebutuhan pasar yang terpenuhi, maka perusahaan dapat meningkatkan nilai penjualan dan laba yang akan diperoleh. Oleh karena itu, “nilai

CR yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kesehatan keuangan perusahaan, sehingga dapat mendorong kenaikan harga saham. *CR* yang tinggi juga dapat membantu perusahaan dalam menghadapi krisis, ketika krisis ekonomi perusahaan dengan *CR* yang tinggi memiliki fleksibilitas untuk mengadopsi strategi keuangan yang diperlukan untuk menjaga kelancaran operasinya. Kemampuan perusahaan dalam menghadapi krisis dapat meningkatkan kepercayaan investor, sehingga menjaga stabilitas harga saham” (Takahepis & Rusqiati, 2024).

“*CR* dapat dikatakan sebagai bentuk dalam mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) perusahaan. Hasil dari pengukuran *CR* apabila rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kekurangan kas untuk membayar utang, namun apabila *CR* tinggi belum tentu kondisi suatu perusahaan sedang baik, hal ini terjadi karena kas tidak digunakan dengan sebaik mungkin” (Qomariyah, 2021). “Untuk perusahaan yang memiliki *current ratio* yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa terdapat kelebihan aset lancar sehingga berpengaruh tidak baik terhadap pertumbuhan laba perusahaan, dikarenakan aset lancar secara umum menghasilkan *return* yang lebih rendah dibandingkan dengan aset tetap dan komponen aset lancar seperti piutang, kas, dan persediaan. Hal tersebut dapat menyebabkan munculnya permasalahan seperti penimbunan kas, menumpuknya persediaan, serta semakin besar kemungkinan piutang tak tertagih” (Ayem et al., 2024). Sebagai contoh, “piutang terlalu tinggi akan menimbulkan rendahnya perputaran modal kerja sehingga semakin kecil pula kemampuan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan. Berkurangnya volume penjualan akan berakibat pada berkurangnya laba yang akan diperoleh perusahaan” (Aniqotunnafiah et al., 2023). Selain itu, “jumlah persediaan masih sangat banyak daripada yang terjual akan menimbulkan kerugian yang besar disebabkan karena persediaan tersebut *expired*” (Meizar et al., 2022). “Persediaan dalam jumlah besar berpengaruh pada timbulnya beban biaya dari biaya simpan dan biaya pemeliharaan, dan risiko kerusakan bahan baku” (Oktavia & Natalia, 2021)”

“*Current ratio* yang rendah relatif lebih riskan, tetapi menunjukkan bahwa manajemen telah mengoperasikan aset lancar secara efektif. Saldo kas dibuat minimum sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perputaran piutang dan persediaan diusahakan maksimum” (Tarigan et al., 2021). “*Current ratio* suatu perusahaan akan rendah jika tidak mampu melunasi utang jangka pendeknya. Karena setiap bisnis lebih memilih untuk menghasilkan keuntungan daripada mengalami kerugian karena tanggung jawab yang tidak dipenuhi, maka suatu bisnis dianggap baik jika mampu memenuhi tugasnya. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat melunasi utang jangka pendeknya dan terus beroperasi secara efektif, perusahaan harus memiliki aset lancar yang cukup” (Arista et al., 2024).

“Nilai rendah pada *current ratio* menunjukan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Namun investor atau calon kreditur juga harus memperhatikan arus kas operasi perusahaan agar bisa lebih memahami tingkat likuiditas perusahaannya. Apabila *current ratio* perusahaan rendah, para investor atau calon kreditur dapat menilai kesehatan keuangan perusahaan yang bersangkutan dengan kondisi arus kas (*cash flow*) operasional pada perusahaan tersebut” (Silanno & Loupatty, 2021). Di sisi lain, “jika perusahaan menentukan aset lancar seperti persediaan yang terlalu kecil maka besar kemungkinan perusahaan berhadapan dengan permasalahan kehabisan persediaan bahan baku dan terhentinya proses produksi sementara waktu” (Oktavia & Natalia, 2021). “Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dapat menimbulkan persepsi negatif di mata investor, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan untuk menanamkan modal” (Zulfa & Hanifah, 2026).

Weygandt et al. (2022) merumuskan cara yang digunakan untuk menghitung *Current Ratio* (CR) sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

CR : *Current Ratio*

Current Assets : Total aset lancar
Current Liabilities : Total liabilitas jangka pendek

Menurut Kieso et al. (2024), “aset adalah sumber daya ekonomi masa kini yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomi adalah hak yang memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Aset diklasifikasikan menjadi 2 yaitu *current asset* dan *non-current asset*. *Current asset* (aset lancar) merupakan kas dan aset lain perusahaan yang diharapkan dapat terkonversi kedalam kas, dijual, atau digunakan selama satu tahun atau dalam siklus operasi, yang mana lebih lama”. Terdapat beberapa akun yang masuk kedalam kategori *current asset*:

1. “*Inventories*”

Menurut Weygandt et al. (2022), “pada perusahaan dagang, inventaris terdiri dari banyak item yang berbeda, Misalnya, di toko bahan makanan yaitu terdiri dari makanan kaleng, produk susu, daging, dan hasil bumi hanyalah beberapa item inventaris yang ada. Barang-barang ini memiliki dua karakteristik umum, yaitu:”

- a. “Barang tersebut dimiliki oleh perusahaan”.
- b. “Barang-barang tersebut dalam bentuk yang siap dijual kepada pelanggan dalam kegiatan bisnis biasa”.

2. “*Receivables*”

“Perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasi karena piutang tak tertagih, jumlah dan sifat dari setiap piutang non-usaha, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Untuk piutang yang timbul dari transaksi yang tidak biasa (seperti penjualan properti, atau pinjaman kepada rekanan atau karyawan), perusahaan harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai piutang jangka panjang, kecuali jika penagihannya diperkirakan akan terjadi dalam waktu satu tahun”.

3. “*Prepaid expenses*”

“Sebuah perusahaan memasukkan biaya dibayar dimuka ke dalam aset lancar jika perusahaan akan menerima manfaat (biasanya jasa) dalam waktu satu tahun atau siklus operasi, mana saja yang lebih lama. *Prepaid expenses* termasuk aset lancar karena jika belum dibayar, maka akan memerlukan penggunaan kas selama tahun berikutnya atau siklus operasi”.

4. “*Short-term investment*”

“Perusahaan harus melaporkan sekuritas yang diperdagangkan (baik utang maupun ekuitas) sebagai aset lancar. Perusahaan mengklasifikasikan investasi non-perdagangan perorangan sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung pada situasinya. Perusahaan harus melaporkan sekuritas yang dimiliki untuk diperdagangkan pada biaya perolehan diamortisasi”.

5. “*Cash and cash equivalent*”

“Kas umumnya terdiri dari mata uang dan giro (uang yang dapat ditarik sesuai permintaan di lembaga keuangan). Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang” (Kieso et al., 2024).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024), “liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika:”

1. “Entitas memperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal”.
2. “Entitas memiliki liabilitas tersebut dengan tujuan utama untuk diperdagangkan”.
3. “Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan”.
4. “Entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

Menurut Weygandt et al. (2022), “liabilitas jangka pendek mencakup liabilitas yang terkait dengan operasi bisnis serta liabilitas yang terkait dengan pembiayaan bisnis:”

1. “Liabilitas yang terkait dengan operasi, misalnya, utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar seperti gaji dan upah, dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama”.
2. “Liabilitas terkait pembiayaan seperti utang bunga dan wesel bayar diperlakukan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo dalam waktu satu tahun”.
3. “Selain itu, setiap utang jangka panjang yang memerlukan pembayaran dalam satu tahun ke depan juga merupakan liabilitas jangka pendek” (Weygandt et al., 2022).

2.6 Pengaruh *Current Ratio (CR)* terhadap *Price Earning Ratio (PER)*

“*Current ratio* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Dengan kata lain seberapa banyak aset lancar menutupi liabilitas jangka pendek yang segera jatuh tempo” (Sari et al., 2021). “Semakin tinggi nilai *CR* menunjukkan semakin kecil risiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya” (Triuspitorini et al., 2022).

“Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi akan diminati oleh investor sehingga berimbas pada harga saham yang akan cenderung naik karena tingginya permintaan. Selain itu, semakin besar *current ratio* mencerminkan likuiditas perusahaan semakin tinggi, karena perusahaan memiliki kemampuan membayar yang besar sehingga mampu memenuhi semua liabilitas finansialnya. Dengan semakin meningkatnya likuiditas pada perusahaan, ini berpeluang meningkatkan *earning* atau pendapatan laba perusahaan, hal tersebut akan membuat nilai *PER* semakin tinggi” (Sari et al., 2021).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro & Setiadi (2022), Mar’aqonitatillah & Setiyono (2024), Makarau et al. (2024), dan Muslim et

al. (2024) menyatakan bahwa *Current Ratio (CR)* berpengaruh positif terhadap *Price Earning Ratio (PER)*, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herdiani et al. (2021), Jariah et al. (2025), dan Lestari & Merliana (2024) yang menyatakan bahwa *Current Ratio (CR)* berpengaruh negatif terhadap *Price Earning Ratio (PER)*. Di sisi lain, hasil lain didapatkan oleh Andika et al. (2021) yang menyatakan *Current Ratio (CR)* tidak berpengaruh pada *Price Earning Ratio (PER)*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha₁ : *Current Ratio (CR)* berpengaruh positif terhadap *Price Earning Ratio (PER)*

2.7 Debt to Equity Ratio (DER)

“*Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa jauh perusahaan dapat mengembalikan utang jangka panjangnya atau dapat juga diartikan sebagai rasio yang menggambarkan perbandingan antara total utang dan ekuitas” (Abdurrohman et al., 2021). Menurut Auliyah & Saleh (2024), “*DER* menggambarkan proporsi pembiayaan utama yang dimiliki suatu perusahaan secara umum menentukan modal perusahaan yang berasal dari liabilitas atau modal sendiri”.

“Dalam menentukan struktur modal digunakan *debt to equity ratio* yang akan memperlihatkan seberapa besar utang dan total ekuitas yang dimiliki perusahaan, rasio yang melebihi dari satu akan memperlihatkan bahwa liabilitas perusahaan lebih besar dibandingkan dengan total modal yang dimiliki perusahaan” (Salsabila & Afriyenti, 2022). “Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan akan menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga dan cicilan utang. Namun jika biaya yang berasal dari utang tinggi tetapi perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan utangnya dengan baik, serta memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan beban bunga utang, maka perusahaan masih dapat memberikan *return* yang tinggi bagi investor” (Putri et al., 2024). “Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasionalnya. Dalam pengambilan

keputusan penggunaan utang ini harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari utang berupa bunga yang akan menyebabkan semakin meningkatnya *leverage* keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa. Dalam menentukan struktur modal yang optimal bagi perusahaan maka diperlukan utang yang baik bagi perusahaan atau *good debt*, utang yang baik bagi perusahaan adalah utang yang dapat menghasilkan keuntungan lagi di masa yang akan datang seperti untuk menambahkan modal usaha atau untuk membiayai suatu proyek yang akan menghasilkan keuntungan” (Salsabila & Afriyenti, 2022). Selain itu, “pembayaran bunga dari utang sering kali bersifat *tax-deductible*, sehingga memberikan potensi perlindungan pajak (*tax shield*) bagi perusahaan” (Wang, 2024). Di sisi lain, perusahaan lebih memilih utang sebagai sumber pendanaan perusahaan karena “penerbitan saham baru akan mengurangi proporsi kepemilikan pemegang saham yang sudah ada dan dapat memberi sinyal kepada pasar bahwa nilai perusahaan dinilai terlalu rendah” (Wang, 2024).

“Perusahaan yang menggunakan utang secara efektif dapat menambah dana perusahaan, sehingga bisa digunakan untuk ekspansi bisnis” (Chandrawati & Sha, 2022). “Ekspansi usaha terbagi menjadi dua macam, yaitu ekspansi internal dan ekspansi eksternal. Ekspansi internal merupakan ekspansi yang dilakukan oleh pihak perusahaan tanpa campur tangan pihak lain diluar perusahaan. Sedangkan ekspansi eksternal dapat ditandai dengan adanya campur tangan perusahaan lain atau penggabungan usaha” (Syaputri, 2022).

“Akan tetapi, utang bisa menjadi sebagai keputusan yang salah dalam pengambilan keputusan struktur modal, dimana utang tersebut digunakan oleh perusahaan untuk membiayai tujuan konsumtif melebihi batas kemampuan yang dimiliki perusahaan, maka dapat dikatakan utang ini merupakan *bad debt* seperti untuk menutup utang sebelumnya yang jatuh tempo” (Salsabila & Afriyenti, 2022). “Tingginya *DER* menunjukkan komposisi total utang semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri sehingga meningkatkan risiko yang diterima investor sebagai akibat dari beban bunga utang yang ditanggung oleh perusahaan” (Gunarso

et al., 2024). “Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut” (Tarigan et al., 2021).

“Semakin rendah *Debt to Equity Ratio (DER)*, maka semakin rendah total utang dibandingkan dengan total ekuitas, hal tersebut mengindikasikan bahwa proporsi pendanaan yang berasal dari utang lebih kecil dibandingkan dengan ekuitas perusahaan” (Wiliasari & Harjanto, 2022). “*DER* rendah mengindikasikan bahwa modal perusahaan berasal dari modal sendiri berupa saham atau laba ditahan” (Ihtiarasari & Durya, 2022). “Semakin rendah *DER* maka semakin rendah juga risiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan karena pendanaan perusahaan dari unsur utang yang lebih kecil daripada modal sendiri” (Hapid & Hanifah, 2022). “Pembiayaan menggunakan ekuitas memungkinkan perusahaan memperoleh sumber pendanaan dari berbagai pihak, seperti investor perorangan, laba ditahan, pendanaan berbasis urun dana (*crowdfunding*), serta laba yang diinvestasikan kembali. Ketersediaan sumber pendanaan tersebut dapat mendukung perusahaan dalam memperluas kegiatan operasional, melakukan investasi pada penelitian dan pengembangan, merekrut tenaga kerja yang kompeten, serta melakukan akuisisi aset baru. Penambahan modal ini berpotensi mendorong pertumbuhan perusahaan, meningkatkan pangsa pasar, dan memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan di industri” (Almanaseer, 2024).

“Selain itu, pembiayaan menggunakan ekuitas memungkinkan perusahaan untuk membagi risiko keuangan dengan para investor sehingga perusahaan memiliki tingkat stabilitas dan fleksibilitas yang lebih baik dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Berbeda dengan pembiayaan utang yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dan pelunasan pokok pinjaman secara berkala, pembiayaan menggunakan ekuitas tidak menambah beban keuangan tetap bagi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara lebih optimal untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan

perusahaan” (Almanaseer, 2024). Namun, “*DER* rendah dianggap kurang menguntungkan karena perusahaan cenderung terlalu konservatif, sehingga kemungkinan kehilangan peluang untuk memanfaatkan *leverage* utang guna meningkatkan laba” (Rahman et al., 2024).

Menurut Ross et al. (2022), “*DER* diukur dengan rumus sebagai berikut:”

$$DER = \frac{Total\ Debt}{Total\ Equity} \quad (2.4)$$

Keterangan:

DER : Debt to Equity Ratio
Total Debt : Total utang perusahaan
Total Equity : Total ekuitas perusahaan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024), “liabilitas adalah liabilitas kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik”. Sedangkan menurut Kieso et al. (2024), “liabilitas adalah liabilitas perusahaan saat ini yang terjadi karena kejadian masa lalu. Liabilitas memiliki tiga karakteristik penting:”

1. “Liabilitas adalah liabilitas masa kini”.
2. “Liabilitas ini memerlukan pengalihan sumber daya ekonomi (kas, barang, jasa)”.
3. “Timbul dari peristiwa masa lalu” (Kieso et al., 2024).

Menurut Kieso et al. (2024), liabilitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. “*Current liabilities*”
 “*Current liabilities* adalah liabilitas jangka pendek (lancar) dilaporkan jika ada satu dari dua kondisi berikut terpenuhi”:
 - a. “Liabilitas diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal; atau”
 - b. “Liabilitas tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan”.

“Terdapat 10 jenis *current liability* yaitu.” (Kieso et al., 2024)

a. “*Accounts payable*”

“*Accounts payable* adalah saldo yang terutang kepada pihak lain untuk barang, persediaan, atau jasa yang dibeli dengan secara kredit”.

b. “*Notes payable*”

“*Notes payable* adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. *Notes payable* dapat timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya”.

c. “*Current maturities of long-term debt*”

“*Current maturities of long-term debt* adalah bagian dari obligasi, wesel hipotek, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo saat ini tidak boleh dicatat sebagai liabilitas jangka pendek jika: dibiayai kembali, atau dilunasi dari hasil penerbitan utang jangka panjang yang baru, dan dikonversi menjadi saham biasa”.

d. “*Short-term obligations expected to be refinanced*”

“*Short-term obligations* adalah utang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan atau dalam siklus operasi normal perusahaan. *Short-term obligation* harus dikeluarkan dari *current liabilities* hanya jika kedua kondisi berikut dipenuhi, yaitu: memiliki rencana untuk mendanai kembali liabilitas atas dasar jangka panjang, dan harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan”.

e. “*Dividends payable*”

“*Dividends payable* adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi dewan direksi (atau dalam kasus lain, pemungutan suara pemegang saham)”.

f. “*Customer advances and deposits*”

“*Current liabilities* dapat mencakup *returnable cash deposit* yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima setoran dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau jasa atau sebagai

jaminan untuk menutupi pembayaran liabilitas yang diharapkan di masa depan”.

g. “*Unearned revenues*”

“Perusahaan memperhitungkan pendapatan diterima dimuka yang mereka terima sebelum menyediakan barang atau melakukan layanan dengan cara”:

- 1) “Ketika perusahaan menerima pembayaran dimuka, perusahaan mendebet kas dan mengkredit akun liabilitas jangka pendek yang mengidentifikasikan sumber pendapatan diterima dimuka;”
- 2) “Ketika perusahaan mengakui pendapatan, perusahaan mendebet akun pendapatan diterima dimuka dan mengkredit akun pendapatan”.

h. “*Sales and value-added taxes payable*”

“Pajak konsumsi umumnya dapat berupa pajak penjualan atau *value-added tax (VAT)*. Tujuan dari pajak ini adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah seperti pajak penghasilan perusahaan atau pribadi. *VAT* tidak sama dengan pajak penjualan. Pajak penjualan hanya dipungut satu kali saat konsumen melakukan pembelian. *VAT* dikenakan pada suatu produk atau jasa setiap kali terdapat penambahan nilai pada tahap produksi dan saat penjualan akhir”.

i. “*Income taxes payable*”

“*Income taxes payable* yaitu pajak penghasilan dalam siklus normal operasi perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan”.

j. “*Employee-related liabilities*”

“*Employee-related liabilities* adalah jumlah yang terutang kepada karyawan berupa gaji atau upah yang dilaporkan sebagai *current liabilities*. *Current liabilities* yang berhubungan dengan kompensasi karyawan juga termasuk pemotong gaji, kompensasi ketidakhadiran, dan bonus” (Kieso et al., 2024).

2. “*Non-current liabilities*”

“*Non-current liabilities* adalah liabilitas yang secara wajar tidak diharapkan untuk dilunasi oleh perusahaan dalam waktu lebih dari satu tahun atau siklus operasi normal. *Non-current liabilities* terdiri dari tiga jenis:”

- a. “Liabilitas yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, liabilitas sewa jangka panjang, dan *notes payable* jangka panjang”.
- b. “Liabilitas yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, seperti liabilitas pensiun dan *income tax liabilities*”.
- c. “Liabilitas yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk memastikan jumlah yang harus dibayar, atau pihak yang menerima pembayaran, atau tanggal pembayaran, seperti liabilitas atas jasa atau produk garansi, liabilitas lingkungan, dan restrukturisasi, yang sering disebut sebagai provisi” (Kieso et al., 2024).

“*Non-current liabilities* terdiri dari:” (Kieso et al., 2024)

- a. “*Bonds payable*”
“Janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan ditambah bunga berkala pada tingkat yang ditentukan”.
- b. “*Long-term notes payable*”
“Perbedaan antara wesel bayar jangka pendek dan wesel bayar jangka panjang adalah tanggal jatuh temponya. Wesel bayar jangka panjang memiliki substansi yang serupa dengan obligasi karena keduanya memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap dan memiliki tingkat bunga yang dinyatakan atau implisit. Namun, wesel bayar tidak diperdagangkan semudah obligasi di pasar sekuritas publik yang terorganisir. Perusahaan kecil biasanya menerbitkan wesel bayar sebagai instrumen jangka panjang. Perusahaan yang lebih besar menerbitkan surat utang jangka panjang dan obligasi”.
- c. “*Mortgages payable*”
“Surat utang hipotek adalah surat utang yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan atas pinjaman”.
- d. “*Pension liabilities*”
- e. “*Lease liabilities*” (Kieso et al., 2024).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024), “ekuitas adalah kepentingan residual dalam aset entitas *setelah* dikurangi seluruh liabilitasnya”. Menurut Kieso

et al. (2024), “ekuitas adalah sisa kepemilikan atas total aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Ekuitas diklasifikasikan dalam laporan keuangan menjadi 6 bagian yaitu:” (Kieso et al., 2024)

1. “*Share Capital*”

“*Share capital* adalah nilai par atau nilai saham yang diterbitkan. *Share capital* mencakup *ordinary shares* atau *common shares* dan *preference shares*”.

2. “*Share Premium*”

“*Share premium* adalah selisih lebih bayar terhadap nilai par atau nilai saham yang dinyatakan”.

3. “*Retained Earnings*”

“*Retained earnings* adalah laba perusahaan yang tidak didistribusikan”.

4. “*Accumulated Other Comprehensive Income*”

“*Accumulated other comprehensive income* adalah jumlah pendapatan komprehensif”.

5. “*Treasury Shares*”

“*Treasury shares* adalah jumlah *ordinary shares* yang dibeli kembali”.

6. “*Non-controlling interest*”

“*Non-controlling interest* adalah bagian ekuitas dari *subsidiaries* yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor” (Kieso et al., 2024).

2.8 Pengaruh *Debt to Equity Ratio (DER)* terhadap *Price Earning Ratio (PER)*

“*DER* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi liabilitasnya, sebagaimana ditunjukkan oleh persentase ekuitas yang digunakan untuk melunasi utang” (Fadjar et al., 2021). “Apabila *DER* rendah menandakan bahwasanya bisnis memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi liabilitas jangka panjangnya, pasar umumnya merespon secara positif terhadap hal ini karena risiko yang terkait dengan pembiayaan utang berkurang dan nilai saham cenderung meningkat” (Harfianto et al., 2025).

“Semakin rendah *DER* akan menjadi sinyal positif bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut sehingga hal itu akan meningkatkan *return* saham” (Santosa & Wibobo, 2022). “Semakin rendah *DER* menunjukkan hasil

capaian baik perusahaan dalam pengembalian utang. Apabila biaya utang lebih rendah dibandingkan dengan dana ekuitas, penambahan utang dalam neraca dapat membantu perusahaan secara keseluruhan meningkatkan profitabilitasnya, yang selanjutnya akan meningkatkan harga sahamnya” (Wiranti et al., 2025). Wulandari et al. (2021) menambahkan, “Jika nilai *DER* dalam suatu perusahaan rendah maka liabilitas yang harus dipenuhi oleh modal semakin aman. Sehingga seorang investor memiliki ketertarikan lebih terhadap perusahaan yang mempunyai nilai *DER* rendah, hal ini menyebabkan harga dari saham dan *return* tersebut meningkat”. Sehingga, dengan meningkatnya harga dan *return* saham, maka akan meningkatkan nilai *price earning ratio*.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Puspitasari et al. (2024), yang menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh negatif terhadap *Price Earning Ratio (PER)*. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Mar’aqonitattillah & Setiyono (2024), Makarau et al. (2024), dan Muslim et al. (2024) yang menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh positif terhadap *Price Earning Ratio (PER)*. Di sisi lain, hasil penelitian dari Sari et al. (2022), Kaltsum & Afandi (2025), Wardana (2024), Jariah et al. (2025), dan Harista & Priyanto (2025) menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio (DER)* tidak berpengaruh terhadap *Price Earning Ratio (PER)*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha₂ : *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh negatif terhadap *Price Earning Ratio (PER)*

2.9 Return on Asset (ROA)

Menurut Kieso et al. (2024), “*Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan penggunaan aset yang dimilikinya”. “*Return on Asset (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan” (Rahmatullah et al., 2025). “*Return on Asset* yakni rasio yang menilai performa perusahaan untuk mendapatkan *net income* dari penggunaan aset” (Alfiani, 2022). “Dengan analisis menggunakan *ROA*, dapat disusun strategi yang relevan untuk

diterapkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan” (Pratiwi & Armaniah, 2025). “Sementara bagi para pemodal baik pemegang saham maupun calon investor, *ROA* bermanfaat dalam memberi gagasan tentang efektivitas perusahaan dalam mengubah uang yang diinvestasikan menjadi laba bersih” (Silanno & Loupatty, 2021).

“Semakin tinggi *ROA* maka semakin tinggi produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih” (Nabela et al., 2023). “Ketika *Return on asset* meningkat artinya terjadi efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset dalam kegiatan operasional sehingga menghasilkan keuntungan yang tinggi” (Eforis & Lijaya, 2021). “Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan berbagai indikator, termasuk tingkat profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional. Kinerja keuangan perusahaan menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan dan keberhasilan suatu organisasi. Langkah yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Penerapan SIM di perusahaan menunjukkan bahwa informasi yang akurat dan tepat waktu memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan, yang berujung pada pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas. Selain itu, SIM mendukung pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan analisis data yang mendalam, yang berdampak positif pada pendapatan dan profitabilitas. Perusahaan dengan sistem informasi yang efektif juga memiliki risiko finansial yang lebih rendah” (Wahyudi, 2025).

“Tingkat keputusan investasi dapat dilihat apabila perusahaan atau manajer dapat meningkatkan keuntungan, dari peningkatan tersebut akan memperoleh kepercayaan dari investor dan pasar untuk membeli sahamnya” (Callista & Nariman, 2025). “Investor lebih menginginkan perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi karena investor beranggapan bahwa dengan profitabilitas yang tinggi, perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang tinggi” (I. R. Purba & Mahendra, 2022). “Dalam jangka panjang, peningkatan *ROA* juga berdampak pada pertumbuhan perusahaan. Perusahaan dengan efisiensi tinggi dalam penggunaan aset akan memiliki arus kas yang lebih sehat, memungkinkan ekspansi

bisnis, inovasi produk, atau peningkatan kapasitas produksi. Dengan demikian, *ROA* tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan saat ini, tetapi juga menjadi prediktor terhadap kinerja masa depan perusahaan” (Marisa et al., 2025).

“Semakin rendah *ROA*, berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset” (Afifah & Ramdani, 2023). “*ROA* yang mengalami penurunan disebabkan adanya peningkatan total aset dan menurunnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan” (Permana et al., 2021). Jika terjadi penurunan nilai *ROA*, “perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan strategi manajemen aset yang lebih efektif. Ini bisa melibatkan penjualan aset yang tidak produktif, peningkatan utilitas aset, atau investasi dalam aset yang dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi” (Ricardo et al., 2024). Sehingga, “menurunnya *ROA* menunjukkan bahwa perusahaan mengelola asetnya dengan kurang produktif, yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan” (Anisa & Febyansyah, 2024). Penurunan pendapatan yang diperoleh perusahaan akan berpotensi menurunkan harga saham.

Weygandt et al. (2022) merumuskan cara yang digunakan untuk menghitung *Return on Asset (ROA)* sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ Total\ Asset} \quad (2.5)$$

Keterangan:

ROA : *Return on Asset*

Net Income : Laba bersih tahun berjalan

Average Total Asset : Rata-rata total aset yang dimiliki perusahaan

“*Average total asset* dapat dihitung menggunakan rumus:” (Weygandt et al., 2022)

$$Average\ Total\ Asset = \frac{Total\ Asset_{(t-1)} + Total\ Asset_{(t)}}{2} \quad (2.6)$$

Keterangan:

$Total Asset_{(t-1)}$: Total aset perusahaan 1 tahun sebelum tahun t

$Total Asset_{(t)}$: Total aset perusahaan di tahun t

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024), “penghasilan (*income*) adalah peningkatan aset, atau penurunan liabilitas, yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas”. Menurut Kieso et al. (2024), “laba bersih merepresentasikan laba setelah seluruh pendapatan dan beban untuk periode tersebut diperhitungkan. Laba bersih dilaporkan pada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Perusahaan umumnya menyajikan komponen laporan laba rugi sebagai berikut:”

1. “*Sales or Revenue Section*”

“Menyajikan penjualan, diskon, pencadangan, retur, dan informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jumlah bersih pendapatan penjualan”.

2. “*Cost of Goods Sold Section*”

“Menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan”.

3. “*Gross Profit*”

“Pendapatan dikurangi harga pokok penjualan”.

4. “*Selling Expenses*”

“Melaporkan pengeluaran yang dihasilkan dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan”.

5. “*Administrative or General Expenses*”

“Melaporkan biaya administrasi umum”.

6. “*Other Income and Expense*”

“Mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan pengeluaran yang disediakan di atas seperti keuntungan dan kerugian penjualan aset jangka panjang, penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan di bagian ini. Selain itu, pendapatan seperti

pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga juga dilaporkan pada bagian ini”.

7. “*Income from Operations*”

“Hasil perusahaan dari operasi normal”.

8. “*Financing Costs*”

“Pos tersendiri yang mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan, seperti beban bunga”.

9. “*Income before Income Tax*”

“Total laba sebelum pajak penghasilan”.

10. “*Income Tax*”

“Bagian singkat yang melaporkan pajak yang dikenakan atas penghasilan sebelum pajak penghasilan”.

11. “*Income from Continuing Operations*”

“Hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak mempunyai keuntungan atau kerugian atas operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih”.

12. “*Discontinued Operations*”

“Keuntungan atau kerugian akibat disposisi suatu komponen perusahaan”.

13. “*Net Income*”

“Hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu”.

14. “*Non-Controlling Interest*”

“Menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham pengendali dan kepentingan non pengendali”.

15. “*Earning per share*”

“Jumlah laba per saham yang dilaporkan” (Kieso et al., 2024).

Menurut Kieso et al. (2024), “aset adalah sumber daya ekonomi masa kini yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomi adalah hak yang memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Aset diklasifikasikan menjadi 2 yaitu *current asset* dan *non-current asset*.”

1. “*Current asset* (aset lancar)”

“*Current asset* (aset lancar) merupakan kas dan aset lain perusahaan yang diharapkan dapat terkonversi ke dalam kas, dijual, atau digunakan selama satu tahun atau dalam siklus operasi, yang mana lebih lama”. Terdapat beberapa akun yang masuk kedalam kategori *current asset*:

a. “*Inventories*”

Menurut Weygandt et al. (2022), “pada perusahaan dagang, inventaris terdiri dari banyak item yang berbeda, Misalnya, di toko bahan makanan yaitu terdiri dari makanan kaleng, produk susu, daging, dan hasil bumi hanyalah beberapa item inventaris yang ada. Barang-barang ini memiliki dua karakteristik umum, yaitu:”

- 1) “Barang tersebut dimiliki oleh perusahaan”.
- 2) “Barang-barang tersebut dalam bentuk yang siap dijual kepada pelanggan dalam kegiatan bisnis biasa”.

b. “*Receivables*”

“Perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasi karena piutang tak tertagih, jumlah dan sifat dari setiap piutang non-usaha, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Untuk piutang yang timbul dari transaksi yang tidak biasa (seperti penjualan properti, atau pinjaman kepada rekanan atau karyawan), perusahaan harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai piutang jangka panjang, kecuali jika penagihannya diperkirakan akan terjadi dalam waktu satu tahun”.

c. “*Prepaid expenses*”

“Sebuah perusahaan memasukkan biaya dibayar dimuka ke dalam aset lancar jika perusahaan akan menerima manfaat (biasanya jasa) dalam waktu satu tahun atau siklus operasi, mana saja yang lebih lama. *Prepaid expenses* termasuk aset lancar karena jika belum dibayar, maka akan memerlukan penggunaan kas selama tahun berikutnya atau siklus operasi”.

d. “*Short-term investment*”

“Perusahaan harus melaporkan sekuritas yang diperdagangkan (baik utang maupun ekuitas) sebagai aset lancar. Perusahaan mengklasifikasikan investasi non-perdagangan perorangan sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung pada situasinya. Perusahaan harus melaporkan sekuritas yang dimiliki untuk diperdagangkan pada biaya perolehan diamortisasi”.

e. “*Cash and cash equivalent*”

“Kas umumnya terdiri dari mata uang dan giro (uang yang dapat ditarik sesuai permintaan di lembaga keuangan). Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang” (Kieso et al., 2024).

2. “*Non-current asset* (aset tidak lancar)”

“Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar”. Menurut Kieso et al. (2024), “*non-current asset* dibagi menjadi:”

a. “*Long-term investments*”

“Investasi jangka panjang, yang sering disebut cukup sebagai investasi, umumnya terdiri dari salah satu dari empat jenis berikut:”

- 1) “Investasi pada sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang”.
- 2) “Investasi pada aset tetap berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam kegiatan operasional, seperti tanah untuk spekulasi”.
- 3) “Investasi yang disisihkan pada dana khusus, seperti dana pensiun atau dana ekspansi pabrik”.
- 4) “Investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau perusahaan asosiasi”.

b. “*Property, plant, and equipment*”

“Aset berwujud yang memiliki jangka waktu panjang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Terdiri dari properti berwujud seperti tanah, gedung, mesin, *furniture*, peralatan & *wasting resources* (*minerals*)”. Dalam sektor *basic materials*, terdapat beberapa perusahaan yang memiliki aset tanah pertambangan yang dikategorikan sebagai *natural*

resources. Menurut Weygandt et al. (2022), “*natural resources* umumnya terdiri dari hutan yang masih berdiri dan sumber daya yang diekstraksi dari dalam tanah, seperti minyak, gas, dan mineral. Alokasi dari *cost of natural resources* secara sistematis selama masa manfaat sumber daya tersebut disebut *depletion*. Perusahaan umumnya menggunakan metode *units-of-activity* untuk menghitung *depletion*. Hal ini dikarenakan *depletion* umumnya bergantung pada jumlah satuan yang diekstraksi selama tahun tersebut. Berdasarkan metode *units-of-activity*, perusahaan membagi *total cost of the natural resources* dikurangi nilai sisa dengan jumlah unit yang diperkirakan terdapat dalam sumber daya tersebut. Hasilnya adalah *depletion cost per unit*. Untuk menghitung penyusutan, *depletion cost per unit* tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang diekstraksi”.

c. “*Intangible assets*”

“Aset tak berwujud tidak memiliki bentuk fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Aset-aset yang dapat diidentifikasi ini mencakup paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan”.

d. “*Other assets*”

“Aset lainnya memiliki banyak macam seperti *long-term prepaid expense* dan *non-current receivables*. Aset lainnya yang termasuk seperti aset dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan kas atau sekuritas yang dibatasi penggunaannya” (Kieso et al., 2024).

2.10 Pengaruh *Return on Asset (ROA)* terhadap *Price Earning Ratio (PER)*

“*Return on Asset (ROA)* adalah rasio antara keuntungan yang dihasilkan dalam satu periode dan aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. *ROA* menjelaskan efektivitas penggunaan aset untuk memperoleh keuntungan” (Rasyidin et al., 2023). “*ROA* mencerminkan kemampuan manajemen untuk mendapatkan pengembalian atas aset perusahaan, yang memberikan gambaran kinerja dan produktivitas aset tersebut. Hal ini akan dilihat oleh investor sebagai aspek profitabilitas di masa mendatang” (Rachman & Kosadi, 2025).

“Bisnis dengan *ROA* yang tinggi menunjukkan bahwa mereka menggunakan sumber daya mereka secara menguntungkan dan efisien. Menurut teori sinyal, bisnis dengan *ROA* yang tinggi dapat memanfaatkan hal ini untuk memberi tahu investor bahwa bisnis tersebut berjalan dengan baik secara finansial dan berpotensi menghasilkan laba yang stabil di masa depan” (Rantung et al., 2024). “Semakin tinggi *ROA* menunjukkan kemampuan perusahaan yang cukup baik dalam menghasilkan laba sehingga meningkatkan minat para investor karena memengaruhi tingkat pengembalian yang semakin besar, sehingga *ROA* akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan” (Christine & Winarti, 2022). Dengan meningkatnya ekspektasi investor terhadap perusahaan atas *return* yang diberikan akan meningkatkan harga saham, hal tersebut akan memengaruhi nilai *price earning ratio*.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian dari Firdiyanti & Rahmani (2023), Mar’aqonitattillah & Setiyono (2024), Kaltsum & Afandi (2025), dan Muslim et al. (2024) yang menyatakan bahwa *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap *Price Earning Ratio (PER)*, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rantung et al. (2024) dan Munandar et al. (2024) yang menyatakan bahwa *Return on Asset (ROA)* berpengaruh negatif terhadap *Price Earning Ratio (PER)*. Di sisi lain, berbeda dari hasil penelitian dari Rachman & Kosadi (2025), Susilo & Sapitri (2022), dan Wardana (2024) yang menunjukkan bahwa *Return On Asset (ROA)* tidak berpengaruh terhadap *Price Earning Ratio (PER)*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha₃ : *Return on Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap *Price Earning Ratio (PER)*

2.11 Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), “GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna

produk dan jasa dunia usaha”. Hendra & Fahlevi (2024) menjelaskan bahwa “*corporate governance* adalah prinsip langsung yang mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (*shareholders*) khususnya, dan para pemangku kepentingan di perusahaan (*stakeholders*)”.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyebutkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* mengandung 5 asas, yaitu:

1. “Transparansi (*Transparency*)”

“Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya”.

2. “Akuntabilitas (*Accountability*)”

“Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan”.

3. “Responsibilitas (*Responsibility*)”

“Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*”.

4. “Kemandirian (*Independency*)”

“Untuk melancarkan pelaksanaan asas *GCG*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain”.

5. “Keadilan (*Fairness*)”

“Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan” (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

“*Corporate governance* adalah sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi” (Sudarmanto et al., 2021). Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* diproksikan dengan dewan komisaris. “Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *GCG*” (Sudarmanto et al., 2021).

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan bahwa “dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan dengan efektif adalah sebagai berikut:”

1. “Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen”.
2. “Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan”.
3. “Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara” (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Adapun pertanggungjawaban dewan komisaris menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) adalah sebagai berikut :

1. “Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Laporan pengawasan dewan komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan”.
2. “Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota dewan komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota dewan komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan”.
3. “Pertanggungjawaban dewan komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas *GCG*” (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Fungsi dari pengawasan dewan komisaris menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) adalah sebagai berikut:

1. “Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal dewan komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab direksi. Kewenangan yang ada pada dewan komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat”.
2. “Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS”.

3. “Dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi”.
4. “Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap”.
5. “Dewan komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka”.
6. “Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) dari RUPS”.
7. “Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan” (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

“Dewan komisaris berperan sebagai alat *monitoring* guna meminimalkan benturan kepentingan antara manajemen dan investor. Jumlah anggota komisaris yang lebih banyak akan menaikkan efektivitas peninjauan dan memastikan penentuan prinsip tata kelola industri yang baik” (Meriana et al., 2025). “Apabila dewan komisaris beranggotakan lebih dari dua orang, hal ini dapat meningkatkan keragaman pengalaman dan pengetahuan yang berguna dalam pengambilan keputusan strategis. Pembagian tugas yang lebih baik juga dapat terwujud, meskipun koordinasi yang efektif di antara para anggota sangat penting untuk menghindari hambatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting

untuk menjaga keseimbangan antara jumlah anggota dewan komisaris dan efektivitas kerja mereka dalam mendukung kinerja keuangan dan strategis perusahaan secara keseluruhan” (Siburian et al., 2024).

“Dengan lebih banyaknya anggota dewan komisaris berarti lebih banyak pengawasan terhadap dewan direksi dan lebih banyak masukan dan opsi untuk direksi. Dengan demikian, lebih banyak dewan komisaris berarti lebih banyak pengawasan dan lebih sedikit kecurangan, yang berarti kinerja keuangan perusahaan akan lebih baik” (Hidayat, 2024). Namun menurut Kurniawan et al. (2024), “semakin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada semakin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan. Dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan”.

“Perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang lebih kecil justru menunjukkan kinerja yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya efisiensi dalam pengambilan keputusan dan koordinasi antar anggota dewan” (Simbolon, 2024). “Ukuran dewan komisaris yang lebih kecil mengarah pada kualitas pelaporan terintegrasi yang lebih baik. Perusahaan cenderung lebih transparan tentang konsekuensi lingkungan dari aktivitas mereka ketika ukuran dewan mereka kecil” (Naylufar & Syafruddin, 2023). “Semakin kecil ukuran dewan komisaris maka semakin efektif karena jumlah anggota dewan komisaris yang banyak berdampak pada lamanya proses pengambilan keputusan” (Permana & Serly, 2021). Namun, “jika semakin sedikit ukuran dewan komisaris maka semakin meningkatkan peluang kecurangan karena perusahaan didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya” (Febrina & Sri, 2022).

Menurut Herdiani et al. (2021), pengukuran dewan komisaris sebagai berikut:

$$DK = \sum \text{Anggota Dewan Komisaris} \quad (2.7)$$

Keterangan:

DK : Dewan Komisaris

$\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}$: Total anggota dewan komisaris perusahaan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 dijelaskan bahwa, “dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. Menurut Herdiani et al. (2021), “jumlah keseluruhan anggota yang menduduki jabatan sebagai dewan komisaris suatu perusahaan pada periode tertentu dan dihitung berdasarkan jumlah satuan disebut dengan ukuran dewan komisaris”. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014, dinyatakan persyaratan untuk dapat menjadi anggota dewan direksi atau dewan komisaris sebagai berikut:

1. “Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;”
2. “Cakap melakukan perbuatan hukum;”
3. “Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. “Tidak pernah dinyatakan pailit;”
 - b. “Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;”
 - c. “Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan”
 - d. “Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat:”
 - 1) “Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;”
 - 2) “Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS;”

- 3) “Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan”.
4. “Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;”
5. “Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan emiten atau perusahaan publik”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa, “perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris”. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014, “dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen. Sedangkan dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 1 (satu) di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris”.

2.12 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Price Earning Ratio (PER)*

“Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan sudah melaksanakan *good corporate governance*” (Febrina & Sri, 2022). “Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif dan pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik” (Hidayat, 2024). “Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer (CEO)* dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen” (Sembiring & Tambunan, 2021).

“Dengan lebih banyaknya anggota dewan komisaris berarti lebih banyak pengawasan terhadap dewan direksi dan lebih banyak masukan dan opsi untuk direksi. Dengan demikian, lebih banyak dewan komisaris berarti lebih banyak pengawasan dan lebih sedikit kecurangan, yang berarti kinerja keuangan perusahaan akan lebih baik” (Hidayat, 2024). “Harga saham akan mengalami peningkatan sebagai cerminan dari meningkatnya kinerja perusahaan dan investor akan bereaksi positif dengan pergerakan saham tersebut. Kinerja keuangan yang konsisten dan kuat membangun kepercayaan investor terhadap perusahaan” (Rasyidin et al., 2023). Dengan meningkatnya harga saham, maka akan memengaruhi nilai *price earning ratio*.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Herdiani et al. (2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Price Earning Ratio (PER)*. Di sisi lain, hasil penelitian dari Haryanto et al. (2024) menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *Price Earning Ratio (PER)*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif untuk penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha₄ : Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Ukuran Dewan Komisaris (DK) berpengaruh positif terhadap Price Earning Ratio (PER)

2.13 Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Asset, dan Good Corporate Governance Secara Simultan terhadap Price Earning Ratio

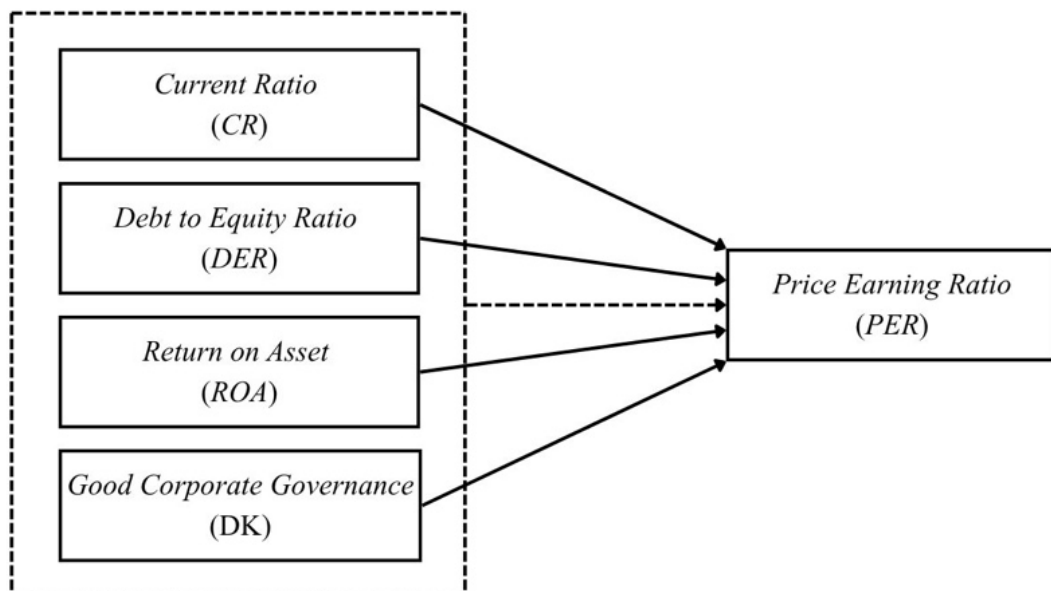
Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rachman & Kosadi (2025) membuktikan bahwa secara simultan ukuran perusahaan, *debt to equity ratio*, dan *return on asset* berpengaruh terhadap *price earning ratio*. Hasil penelitian Firdiyanti & Rahmani (2023) membuktikan bahwa secara simultan *return on asset* dan *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *price earning ratio*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herdiani et al. (2021) membuktikan bahwa secara simultan likuiditas, *leverage*, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan *sales growth* berpengaruh terhadap *price earning ratio*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasisca & Sembiring (2025)

membuktikan bahwa secara simultan dewan komisaris independen, komite audit, dewan direksi, *corporate social responsibility*, dan *return on equity* berpengaruh terhadap *price earning ratio*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Munandar et al. (2024) yang membuktikan bahwa secara simultan *return on asset*, *net profit margin*, dan *debt to asset ratio* berpengaruh terhadap *price earning ratio*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Makarau et al. (2024) membuktikan bahwa secara simultan *current ratio* dan *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *price earning ratio*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Merliana (2024) membuktikan bahwa secara simultan *net profit margin*, *current ratio*, *debt to asset ratio*, dan *return on equity* berpengaruh terhadap *price earning ratio*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslim et al. (2024) membuktikan bahwa secara simultan *return on asset*, *debt to equity ratio*, dan *current ratio* berpengaruh terhadap *price earning ratio*.

2.14 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka dapat dinyatakan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran